

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Peranan

Peranan pimpinan dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi. Istilah peran adalah seperangkat tingkah laku yang dapat diberikan oleh seseorang untuk dapat berdampak terhadap lingkungan sosialnya, baik diberikan dengan sadar maupun tidak sadar yang dimana sesuai dengan kemampuan dan kedudukan yang diperoleh seseorang dari lingkungan sosialnya.

Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang timbul karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga sangat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan (Thoha 2010,10).

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan suatu yang diharapkan untuk dapat dilakukkkkan dan dijalankan oleh manusia. Peran adalah sesuatu yang komplit dengan kata lain bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda diantaranya bisa dilihat dari cara individu harus bersikap, berbuat sesuatu dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya dan sudut pandang lainnya. Peran adalah sesuatu yang di dapat oleh manusia baik secara disengaja maupun tidak disengaja, dengan maksud peran yang disengaja yaitu peran yang di dapat oleh seseorang dengan cara formal dan adanya keterikatan dengan cara yang sengaja dibuat, misalnya seorang menjadi guru. Sedangkan peran tidak disengaja adalah peran yang secara langsung didapatkan oleh seseorang dengan tidak adanya paksaan dan aturan yang mengikat diri seseorang, misalnya ibu rumah tangga.

Dari beberapa konsep diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan penuh kesadaran serta penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Maka dari itu Peran sangat berkaitan erat dengan Kepemimpinan Kepada Desa bagaimana seorang pemimpin mampu melakukan tugasnya, dengan itu disini peneliti menggunakan teori Kepemimpinan yang dikemukakan oleh Willian James Reddin yang dimana tiga aspek peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu Berorientasi Tugas, Berorientasikan Hubungan Kerja dan Berorientasikan Hasil yag Efektif. Teori ini digunakan oleh peneliti karena Peran

Kepala Desa Paoh Concong ini Dinilai Kurang Optimal dalam memaksimalkan pembangunan.

2.2. Teori

2.2.1. Teori Kepemimpinan

Menurut Kartono (2017-153), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Maka pemimpin itu harus mahir melaksanakan kepemimpinannya, jika seorang pemimpin ingin sukses dalam melakukan tugas-tugasnya. Pemimpin juga harus mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi para bawahannya dan mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga bawahannya seoptimal mungkin dalam setiap gerak usahanya demi suksesnya organisasi, juga bisa mengembangkan dan memajukan penganutnya menuju pada proses kesejahteraan.

Menurut William James Reddin (Kartono 2014-34), terdapat tiga aspek peran yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu :

1. Berorientasi Tugas (*task orientation*).

Berorientasi tugas adalah seorang pemimpin dapat dilihat dari kualitas keinginannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan demikian ada seorang pemimpin yang memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya, namun ada pula pemimpin yang lemah hasratnya untuk menyelesaikan tugas. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan beberapa

pekerjaan indikator yaitu punya keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan, kualitas pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

2. Berorientasi Hubungan Kerja (*relationship orientation*).

Berorientasi Hubungan Kerja adalah bahwa seorang pemimpin dapat dilihat juga dari kualitas perhatiannya terhadap hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan dengan atasannya, dengan koleganya yang setingkat dan terutama dengan bawahannya. Dengan demikian ada pemimpin yang mempunyai hubungan yang erat dengan orang lain, dan ada pula hubungannya sangat bersifat formal. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator yaitu aktif dalam melakukan interaksi dan punya hubungan kerja yang baik dengan bawahan maupun orang lain.

3. Berorientasikan Hasil yang efektif (*effectiveness orientation*).

Berorientasikan hasil yang efektif adalah seorang pemimpin yang satu berbeda dengan pemimpin lainnya. Kemauan untuk memperoleh produktifitas yang tinggi, dengan demikian ada seorang pemimpin yang efektif sekali, dan ada pula pemimpin yang tidak efektif sama sekali. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan beberapa indikator yaitu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pekerjaan.

Berdasarkan ketiga orientasi tersebut William James Reddin menentukan delapan tipe kepemimpinan :

1. Tipe *desenter* adalah tipe yang menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tidak ada rasa keterlibatan dengan anggota dan organisasi, moral, rendah, tindakannya sukar diprediksi.
2. Tipe birokrat, tipe yang menunjukkan perilaku kepemimpinan yang patuh dan taat pada peraturan, memiliki kemampuan berorganisasi (manusia organisasi) dan cenderung lugu.
3. Tipe misionaris adalah tipe yang menunjukkan perilaku kepemimpinan sebagai penolong yang lemah dan menggampangkan masalah yang dihadapi.
4. Tipe *developer* atau pembangun dalam memajukan dan mengembangkan organisasi, yang menunjukkan perilaku kepemimpinan kreatif, melimpahkan wewenang, dan menaruh kepercayaan yang tinggi kepada anggota sebagai bawahan.
5. Tipe *autoctrat* (otokrasi), yang menunjukkan perilaku kepemimpinan yang keras kepala dan bandel karena merasa benar sendiri.
6. Tipe *benevolent autocrat*, menunjukkan perilaku kepemimpinan dalam bekerja lancar dan tertib, ahli dalam pengorganisasian, dan memiliki rasa keterlibatan diri dalam menggunakan kewenangan atau kekuasaan pemimpin.

7. Tipe *compromisser* (kompromis), menunjukkan perilaku kepemimpinan tidak tetap pendirian, menunda-nunda dan bahkan tidak membuat keputusan, berwawasan/pandangan dangkal.
8. Tipe *executive* (eksekutif), menunjukkan perilaku bermutu tinggi, memiliki kemampuan memberikan motivasi pada anggota organisasi sebagai bawahan dan berpandangan luas.

Menurut Kartono (2011,48) mengemukakan kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas tertentu, dan punya tujuan serta perlatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan, serta cocok-pas dengan situasi dan zamannya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai

dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut. Dalam Syafi'ie (2013,3) mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan sebagai pusat prses kelompok
- b. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat
- c. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan
- d. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi
- e. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku
- f. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan
- g. Kepemimpinan sebagai suatu kekuasaan
- h. Kepemimpinan sebagai pencapai tujuan
- i. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi
- j. Kepemimpinan sebagai pemisah peranan
- k. Kepemimpinan sebagai awal struktur

Dalam Widjaja (2014,31) menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.

Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadarannya (bukan keterpaksaan) dengan tanpa ragu-ragu mereka melakukan dengan sebaik-baiknya, sekalipun masyarakat tidak berada di tempat misalnya dalam tolong-menolong dan gotong-royong. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses kegiatan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan individu-individu supaya timbul kerjasama secara teratur dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Senada dengan kesimpulan ini, dalam Kartono menyebutkan kepemimpinan memiliki unsur-unsur antara lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain dan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

2.2.2. Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan yang efektif dan terwujud apabila dijalankan sesuai fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dalam kehidupan sosial dalam organisasi, yang dapat dikatakan dengan kata lain kepemimpinan memiliki fungsi dalam sebuah organisasi. Menurut Handari (2012, 74) “fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi sebagai berikut” :

1. Dimensi yang berkenan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlibat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.
2. Dimensi yang berkenan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin.

Berdasarkan kedua dimensi diatas, selanjutnya secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan. Kelima fungsi kepemimpinan itu adalah :

1. Fungsi Instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikatif satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu mulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah).

2. Fungsi konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat dua arah meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dalam menentukan keputusan pemimpin kerap kali memerlukan bahan

pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Dalam melaksanakan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menentukan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi ini mengharuskan memilah-milah tugas pokok organisasi dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercaya.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif maupun mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

2.2.3. Kepemimpinan Yang Efektif

Dalam Nawawi (2012, 9) menegaskan bahwa yang efektif adalah kepemimpinan yang hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan aturannya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu, pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian kelompok/organisasi.

Di dalam kehidupan manusia banyak ditemui usaha kerja untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama-sama. Kerjasama itu dilakukan oleh beberapa orang maupun dilakukan secara berkelompok, dalam berbagai kegiatan yang terarah pada tujuan yang lebih mudah di capai dari pada di kerjakan sendiri. Semua proses kerjasama itu disebut organisasi dalam kenyataannya apapun bentuk suatu organisasi pasti memerlukan seseorang pemimpin, seorang yang menduduki suatu jabatan diartikan sebagai kemampuan/kecerdasan mendorong agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

2.2.4. Pemerintahan Desa

Penyelenggara pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
2. Unsur membantu kepala desa, yaitu terdiri atas

3. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
4. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
5. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kepala desa juga mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam atau diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.

Sedangkan yang menjadi larangan bagi Kepala Desa telah diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

2.2.5 Pembangunan Desa

Sebelum dijelaskan pengertian pembangunan desa terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian dari pembangunan itu sendiri. Pengertian pembangunan sebagaimana dikemukakan Hariyono (2010, 21), “pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu”.

Sedangkan menurut Todaro (2010, 20) pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penangan ketimpang pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan secara padat disampaikan oleh Siagian (2019, 29) sebagai berikut :

- a. Pembangunan mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada.
- b. Pembangunan adalah kemampuan suatu Negara untuk terus berkembang secara kualitatif maupun kuantitatif.
- c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan secara terencana.
- d. Pembangunan merupakan wujud cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Setelah mengetahui pengertian pembangunan secara umum, maka dapat disimpulkan pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian usaha-usaha yang dilakukan

dalam lingkungan desa dengan tujuan mempertinggi taraf hidup masyarakat desa berdasarkan asas kekuatan sendiri daripada masyarakat desa, asas pemufakatan bersama-sama anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijakan umum yang sama.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Kupah Kecamatan Sungan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.3.1. Penelitian yang relevan I

Judul Penelitian	Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Kupah Kecamatan Sungan Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Nama dan Tahun Penelitian	Hesti dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Tahun 2020.
Teori	Teori Peran yang digunakan Menurut Bintoro Tjokroamidjojo 2000, 42). <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Motivator 2. Peran Fasilitator 3. Peran Mobilisator
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama lokasi penelitian dilakukan pada Desa sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kwaitatif serta menggunakan teori Peran menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000, 42). Ketiga, berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bagaimana peranan

	Kepala Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)..
Persamaan dengan peneliti	Persamaan penelitian milik Hesti dengan peneliti adalah pada fokus penelitian yaitu bagaimana seorang kepala pemerintah suatu daerah dalam lingkup kecil dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Perbedaan dengan penelitian	Perbedaan penelitian Hesti dengan peneliti adalah pada subjek, serta menggunakan teori yang berbeda.

Sumber : Hesti. 2020. *Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Kupah Kecamatan Sungan Kakap Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak : Universitas Tanjungpura.

2. Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.3.2 Penelitian yang relevan II

Judul Penelitian	Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang
Nama dan Tahun Penelitian	Andrianus Badul dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Tahun 2020.
Teori	Teori W.J Reddin (Dalam Kartono 2014, 34) terdapat tiga aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasikan Tugas (<i>task orientation</i>) 2. Berorientasikan Hubungan Kerja (<i>relationship orientation</i>) 3. Berorientasi Hasil yang Efektif (<i>effectiveness orientation</i>).
Hasil Penelitian	Hasil penelitian yang relevan diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian menekankan pada peran Kepala

	Desa dalam mengelola dana desa belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah desa dan perangkat desa belum optimal dalam mengelola dana desa.
Persamaan dengan Penelitian	Adapun persamaan penelitian antara peneliti dan penelitian Andrianus Badul adalah terletak pada teori kepemimpinan, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.
Perbedaan dengan Penelitian	Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lokasi penelitian. Andrianus Badul melakukan penelitian di Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

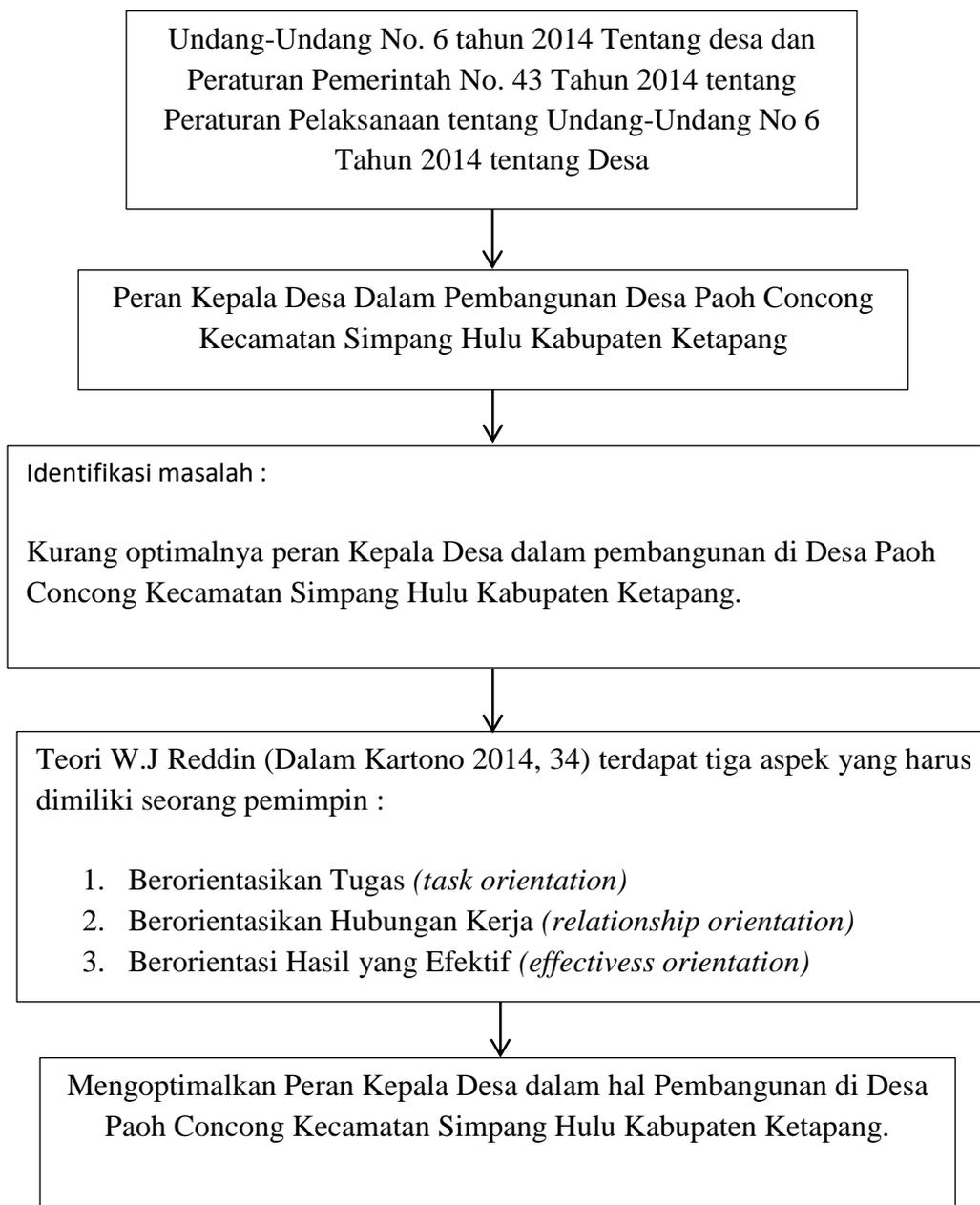
Sumber : Andrianus Badul. *Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang*. Pontianak : Universitas Tanjungpura

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berikut ini dikemukakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena peranan kepala desa dalam pembangunan. Untuk kepentingan penelitian ini, kepala desa adalah pemimpin pemerintah dan pemimpin masyarakat di desa. Dalam model penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan peran kepala desa pada pembangunan desa berdasarkan konsep kepemimpinan. Peran kepala desa dalam pembangunan disini yang dimaksud adalah tingkat kemampuan kepala desa dalam menggerakkan, mempengaruhi dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang kemudian secara langsung akan mengetahui faktor-faktor penyebab belum optimalnya peran kepala desa dalam

pembangunan. Sehingga dengan demikian kepala desa dapat mengoptimalkan perannya guna mencapai keberhasilan pembangunan. Alur pemikiran tersebut dapat di lihat pada gambar 2.4.1 di bawah ini.

Gambar 2.4.1. Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum optimal ?